



RINALDO ADI PRATAMA & MOCH ERYK KAMSORI

## Mengenai Sutan Akbar pada Masa Revolusi Indonesia di Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat, Tahun 1947 – 1948

**IKHTISAR:** Divisi Bambu Runcing merupakan sebuah lasykar yang dibentuk oleh Sutan Akbar, yang terdiri atas gabungan lasykar-lasykar perjuangan di Jawa Barat yang masih tersisa, setelah Divisi Siliwangi mendapatkan gempuran oleh pasukan Belanda selama Agresi Militer I pada bulan Juli 1947. Keberadaan Divisi Bambu Runcing sebenarnya mendapatkan mandat resmi dari Jenderal Sudirman, yang pada awal revolusi Indonesia memang bersikap oposisional kepada pemerintah. Karena itu, sikap Sutan Akbar juga menentang segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam melakukan diplomasi dengan pihak Belanda. Sutan Akbar memilih daerah Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat, sebagai markas utamanya, yang pada saat itu juga Ciwaru sedang dijadikan Pusat Pemerintahan Darurat Keresidenan Cirebon. Dari daerah Ciwaru inilah Sutan Akbar dapat mengendalikan pergerakan Divisi Bambu Runcing di seluruh wilayah Jawa Barat; namun di Ciwaru ini juga Divisi Bambu Runcing mengalami kehancurannya, karena harus berhadapan langsung dengan kekuatan resmi tentara Republik Indonesia, yakni Divisi Siliwangi.

**KATA KUNCI:** Sutan Akbar; Divisi Bambu Runcing; Kemelut dalam Sejarah; Divisi Siliwangi; Ciwaru.

**ABSTRACT:** "About the Sutan Akbar in the Time of Indonesian Revolution in Ciwaru, Kuningan, West Java, 1947-1948". Bamboo-Spear Division was an army formed by Sutan Akbar, consisting of a combined army-paramilitary troops struggle in West Java remaining, after Siliwangi Division has gotten onslaught by Dutch troops during the first military aggression in July 1947. The existence of Bamboo-Spear Division actually obtained an official mandate from the General Sudirman, who at the beginning of the Indonesian revolution was indeed to be opposing to the government. Therefore, the political attitude of Sutan Akbar also opposed all policies implemented by the government of the Republic of Indonesia, especially in conducting diplomacy with the Netherlands. Sutan Akbar has chosen Ciwaru, Kuningan, West Java, as its main headquarters, which at that time, Ciwaru was also used as the Center of Emergency Government in Cirebon Residency. From the Ciwaru region, Sutan Akbar can control the movement of Bamboo-Spear Division in the entire region of West Java; but from this Ciwaru region, the Bamboo-Spear Division also experienced a downfall of having to deal directly with the official power of the army of the Republic of Indonesia, namely Siliwangi Division.

**KEY WORD:** Sutan Akbar; Bamboo-Spear Division; Turmoil in History; Siliwangi Division; Ciwaru.

**About the Authors:** Rinaldo Adi Pratama, S.Pd. adalah Alumni Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung, lulus tahun 2015. Moch Eryk Kamsori, S.Pd. adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung. Untuk keperluan akademik, penulis dapat dihubungi dengan alamat e-mail: [rinaldo\\_ap@outlook.com](mailto:rinaldo_ap@outlook.com)

**How to cite this article?** Pratama, Rinaldo Adi & Moch Eryk Kamsori. (2015). "Mengenai Sutan Akbar pada Masa Revolusi Indonesia di Ciwaru, Kuningan, Jawa Barat, Tahun 1947 – 1948" in *SUSURGALUR: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, Vol.3(2), September, pp.217-228. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UBD Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, ISSN 2302-5808.

**Chronicle of the article:** Accepted (March 13, 2015); Revised (June 13, 2015); and Published (September 30, 2015).

## PENDAHULUAN

Divisi Bambu Runcing merupakan salah satu lasykar perjuangan yang pernah terlibat aktif ikut bergerilya di wilayah Jawa Barat selama masa revolusi kemerdekaan berlangsung. Pembentukan Divisi Bambu Runcing ini sendiri terjadi tidak lama setelah pasukan Belanda melancarkan Agresi Militer I pada bulan Juli 1947. Sebenarnya, bila dilihat dari tujuan awal dibentuknya lasykar ini tidak terlepas dari anggapan para petinggi militer yang sedang berada di Yogyakarta bahwasanya kekuatan militer yang berada di wilayah Jawa Barat, yakni Divisi Siliwangi, telah hancur dan menyerah kepada pihak Belanda selama dilancarkan agresi yang pertama. Maka dari itu, tujuan utama pemerintah, dalam hal ini Jenderal Sudirman atas pembentukan awal Divisi Bambu Runcing, adalah membangun kembali kekuatan bersenjata di wilayah Jawa Barat untuk mengisi kekosongan kekuatan bersenjata yang telah lumpuh akibat serangan dari Belanda tadi (Fachrudin, 1994).

Dalam perjalanan sejarahnya, Divisi Bambu Runcing seringkali bertentangan dengan pemerintah mengenai cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan Belanda. Divisi Bambu Runcing sebenarnya banyak menolak perundingan-perundingan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan sengketa antara pihak Belanda dan Indonesia selama revolusi berlangsung (DHC '45 Kab Kuningan, 2006).

Dengan melakukan perundingan atau berdiplomasi dengan Belanda, secara tidak langsung, pihak Indonesia menganggap bahwa eksistensi dirinya dan pihak Belanda sudah ada, besar, dan sejajar di wilayah republik. Walaupun demikian, dalam perjalanannya, Divisi Bambu Runcing seringkali memperlakukan strategi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Maka,

Divisi Bambu Runcing terus melakukan perlawanan secara fisik terhadap Belanda, karena dalam pandangan pimpinan Divisi Bambu Runcing, diplomasi telah dianggap menyalahi prinsip revolusi (*cf* DHC '45 Kab Kuningan, 2006; dan Suwirta, 2015).

Bagi Divisi Bambu Runcing, Belanda sudah sepatutnya dihadapi dengan perlawanan secara fisik dan tanpa ada kompromi di meja perundingan. Dalam hal ini, seringkali Divisi Bambu Runcing melancarkan aksi-aksi gerilyanya di wilayah Jawa Barat yang telah berhasil dikuasai oleh Belanda (Sudarta, 2013). Manakala pemerintah Republik Indonesia sibuk melakukan perundingan-perundingan dengan Belanda, Divisi Bambu Runcing justru terus melakukan aksinya untuk mewujudkan sebuah negara republik yang tak ada hubungannya dengan Belanda. Akibat pandangan kaku yang diberikan oleh sosok pemimpin Divisi Bambu Runcing ini, pada saat yang sama, sebenarnya Divisi ini dibentuk untuk membantu kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam hal kekuatan bersenjata di daerah pendudukan Belanda. Namun, dalam perkembangannya, Divisi ini malah berbalik menjadi penentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia, yang telah banyak menempuh strategi diplomasinya (Hermawan, 2000; dan Suwirta, 2015).

Dalam konteks ini, Divisi Bambu Runcing menyalahkan pihak pemerintah, khususnya Perdana Menteri Sutan Syahrir, bahwasanya akibat perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia guna menyelesaikan masalah, malah mengakibatkan wilayah Jawa Barat berhasil dikuasai oleh Belanda. Dengan demikian, sekali lagi, Divisi Bambu Runcing yang sebenarnya dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia, yang pada masa revolusi Indonesia berkedudukan di Yogyakarta, malah berbalik menjadi tandingan atas

kebijakan politik pemerintah Republik Indonesia sendiri (Wiryono, 1997/1998).

Seiring dengan berjalannya waktu, hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Divisi Bambu Runcing, dalam upaya menghadapi kekuatan Belanda, ternyata menemui jalan yang lebih sulit dan terjal. Pihak Belanda tidak dapat dihadapi secara militer, karena tentu saja pasukan Divisi Bambu Runcing kalah dari segi pasukan dan perlengkapan perang. Sedangkan sikap penentangan Divisi Bambu Runcing terhadap pemerintah Republik Indonesia telah membawa Divisi Bambu Runcing harus berhadapan langsung dengan kekuatan militer resmi, yakni kesatuan Divisi Siliwangi, yang senantiasa mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia (Nasution, 1979).

Adapun pembahasan tentang Divisi Bambu Runcing yang diangkat dalam artikel ini fokus pada aspek spasial dan temporal yang menjadikan Divisi Bambu Runcing bisa menjadi suatu kekuatan yang sempat berpengaruh di daerah Jawa Barat. Guna membatasi pembahasan agar tidak meluas dan tentu saja tidak memungkinkan untuk membahas dan mengikuti pembagian secara administratif, karena Divisi Bambu Runcing sebagai sebuah organisasi gerilya senantiasa berpindah-pindah tempat dari waktu ke waktu dengan berbagai situasi dan kondisi. Maka, pembahasan dalam artikel ini lebih ditujukan pada tempat yang pernah menjadi daerah operasi dan pangkalan utama Divisi Bambu Runcing selama menjalankan aksinya pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

Adapun daerah itu adalah Ciwaru, yang merupakan sebuah Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan daerah Jawa Tengah. Sedangkan untuk pembatasan waktunya fokus pada tahun 1947 sampai 1948. Pembatasan awal merupakan waktu dimana Divisi Bambu

Runcing terbentuk, bersamaan dengan dilancarkannya Agresi Militer I tahun 1947; dan tahun 1948 adalah dimana Divisi Bambu Runcing dapat dikatakan hancur dengan banyak terbunuh dan tertangkapnya para tokoh-tokoh Divisi Bambu Runcing oleh pasukan dari Divisi Siliwangi.

### **LAHIRNYA DIVISI BAMBU RUNCING**

Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Di wilayah Jawa Barat sendiri, agresi yang dilancarkan dimulai dari wilayah Jakarta. Pada awal serangannya, Belanda dapat menguasai secara penuh wilayah Jakarta dan selanjutnya dengan mudah membobol garis-garis pertahanan Divisi Siliwangi (Ekadjati, 1980/1981; dan Lubis, 2003). Lewat agresinya tersebut, jalur hubungan darat di wilayah Jawa Barat dapat dikuasai secara penuh oleh Belanda dan dengan mudahnya berhasil menduduki kota-kota penting, seperti Bogor, Sukabumi (termasuk Pelabuhan Ratu), Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Cirebon (Nasution, 1966:103). Sementara itu, karena terdesak oleh kekuatan Belanda, pada akhirnya pasukan Divisi Siliwangi bergerak mundur ke hutan-hutan, seperti di Selatan Cianjur dan Sukabumi, bahkan ada pula yang menuju ke Cirebon, Gunung Ciremai, dan daerah Jawa Tengah (Nasution, 1979:150).

Agresi Militer Belanda I merupakan pukulan hebat bagi kesatuan Divisi Siliwangi. Akibat agresi yang dilancarkan oleh Belanda memaksa pasukan Divisi Siliwangi melakukan “gerakan menarik diri” ke hutan-hutan untuk dapat memulihkan kembali sistem komando dan pertahanan. Peristiwa tersebut menyebabkan reputasi dari kesatuan Divisi Siliwangi menjadi turun dan rusak, seperti yang diungkapkan oleh A.H. Nasution (1979) sendiri bahwa “setelah *clash* itu tidak banyak terdengar adanya aktivitas tentara yang menggemparkan di Jawa

Barat” (Nasution, 1979:347). Hal ini diperkuat dengan adanya selebaran dan berita di radio yang disiarkan oleh Belanda, dimana isinya seakan-akan menyampaikan pesan A.H. Nasution selaku Panglima Divisi Siliwangi agar seluruh pasukan di Jawa Barat untuk menyerahkan diri (*cf* Disjarahdam, 1978:118; dan Nasution, 1979).

Menurunnya reputasi Divisi Siliwangi dan kondisinya yang kalah untuk menghadapi agresi militer Belanda, kemudian, dimanfaatkan oleh mantan pimpinan LRDR (Lasjkar Rakjat Djakarta Raya), yakni Sutan Akbar. Tujuannya adalah untuk dapat meneruskan perlawanan terhadap Belanda di wilayah Jawa Barat (Fachrudin, 1994). Adanya dukungan dari kawan-kawannya dan lasykar-lasykar perjuangan yang masih tersisa di wilayah Cirebon, Sutan Akbar berusaha untuk meyakinkan Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), bahwa meskipun Divisi Siliwangi telah hancur, tapi unsur-unsur lasykar di Jawa Barat masih berjalan secara efektif.

Sutan Akbar terus mendesak agar tugas untuk merebut dan mempertahankan daerah Jawa Barat diserahkan kepada dirinya. Pada akhirnya, Jenderal Sudirman menyetujui dan memberikan mandat rahasia kepada Sutan Akbar guna membentuk lasykar baru, yang kemudian oleh Sutan Akbar diberi nama “Divisi Bambu Runcing” (Tjokropranolo, 1992:93).

Pembentukan Divisi Bambu Runcing tidak seperti pembentukan sebuah divisi yang biasanya. Seperti dimulai dengan suatu kongres atau pertemuan besar, atau mungkin setidaknya dilakukan pertemuan untuk membentuk suatu divisi, dimana melibatkan mereka yang kemudian paling berwenang dalam kesatuan Divisi Bambu Runcing di suatu daerah. Namun, yang terjadi adalah proses pembentukan Divisi Bambu Runcing dimulai ketika Sutan Akbar memberitakan bahwasannya Divisi

Bambu Runcing telah berstatus “resmi” sebagai satuan lasykar baru pada akhir bulan Juli 1947 (Fachrudin, 1994:34).

Setelah deklarasi pembentukan Divisi Bambu Runcing usai, Sutan Akbar pun akhirnya mengirimkan kurir kepada kawan-kawannya yang tersebar di wilayah Jawa Barat untuk membentuk satuan-satuan perjuangan yang bernaung di bawah nama Divisi Bambu Runcing. Selanjutnya, mengenai pembentukan kesatuan Divisi Bambu Runcing dan penentuan pemimpin perjuangan yang terdapat di daerah-daerah diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif di daerahnya masing-masing. Dari hal tersebut nampak bahwa pembentukan kekuatan Divisi Bambu Runcing tidaklah memperhatikan sebuah kematangan dan kualitas dari sebuah kekuatan bersenjata yang nantinya hendak melawan Belanda.

Dalam rencana awal Sutan Akbar, dirinya akan membagi Divisi Bambu Runcing kedalam lima wilayah yang menjadi bagian dari Jawa Barat pada masa itu. Adapaun wilayah tersebut adalah Keresidenan Jakarta, Keresidenan Priangan, Keresidenan Bogor, Keresidenan Banten, dan Keresidenan Cirebon (Lubis, 2003).

Namun, dalam kenyataannya, bagian terbesar wilayah yang akan dijadikan basis pergerakan Divisi Bambu Runcing seperti Keresidenan Priangan, Keresidenan Bogor, apalagi Keresidenan Jakarta telah menjadi wilayah yang dikuasai secara penuh oleh Belanda pasca Agresi Militer I. Melihat keadaan seperti itu, Sutan Akbar tidak dapat memaksakan diri untuk menempatkan Divisi Bambu Runcing di wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Selain itu, Sutan Akbar tidak memiliki jaringan yang kuat dengan lasykar-lasykar yang akan dijadikan basis pembentukan satuan-satuan Divisi Bambu Runcing.

Sedangkan di Banten, keberadaan Divisi Bambu Runcing baru mulai muncul ketika kesatuan lasykar-lasykar

di bawah Divisi Bambu Runcing telah berada pada tahap akhir kehancurannya. Maka dari itu, wilayah yang memungkinkan untuk dapat tumbuh berkembangnya Divisi Bambu Runcing adalah di wilayah Keresidenan Cirebon.

Kehadiran satuan Divisi Bambu Runcing di Keresidenan Cirebon berada di daerah Ciwaru. Setelah penyerangan oleh Belanda ke pusat Kota Cirebon, pusat pemerintahan dialihkan ke wilayah pedalaman Kuningan. Ciwaru pada saat itu menjadi ibu kota sementara Keresidenan Cirebon dari tahun 1947 hingga 1950. Sesungguhnya keberadaan Divisi Bambu Runcing di Ciwaru ini merupakan satuan terkuat yang terdapat dalam ketentaraan Indonesia, baik secara politis maupun secara strategis militer. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh R. Fachrudin (1994), sebagai berikut:

[...] DBR yang terdapat di Ciwaru merupakan satuan terkuat yang ada di Divisi Bambu Runcing, secara politis maupun strategis militer. Mereka langsung berada di bawah pimpinan Sutan Akbar, dengan Sastrowiryo dari Laskar Rakyat Cirebon sebagai kepala stafnya. Kepemimpinan DBR di Ciwaru juga diperkuat oleh Abdul Chamdi dan Achmad Astrawinata, yang pernah aktif di dalam LRDR (Fachrudin, 1994:41).

Selama berada di Ciwaru, satuan Divisi Bambu Runcing ini menempati markas yang cukup strategis. Mereka cukup aman dari serangan Belanda, karena secara jarak dari kedudukan Belanda di Cirebon cukup jauh untuk menjangkau Ciwaru, yang berjarak sekitar 70 Km (Kilometer). Dari Ciwaru juga Divisi Bambu Runcing dapat dengan mudah menguasai garis komunikasi utama lewat jalur darat, karena Ciwaru berada di antara Jawa Barat dan Jawa Tengah (Fachrudin, 1994:42).

Oleh karena itu, Sutan Akbar dapat memperoleh informasi dan perlengkapan secara teratur dari kawan-kawannya di Yogyakarta (Cribb, 1991:154). Namun, markas atau

pangkalan utama Divisi Bambu Runcing yang berada di Ciwaru ini tidak dapat menjadi komando satuan pusat yang berada dibawah Divisi Bambu Runcing secara keseluruhan. Sutan Akbar tidak memiliki kekuasaan yang besar dan nyata atas kesatuan Divisi Bambu Runcing yang terdapat di wilayah lain, seperti di daerah gunung Sanggabuana dan daerah Sukabumi-Cianjur (Fachrudin, 1994).

Sutan Akbar tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap satuan yang telah terbentuk di wilayah-wilayah yang telah disebutkan tadi. Hal ini bisa saja diakibatkan karena jarak markas yang berjauhan, sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik antara satu markas Pusat dengan markas-markas lainnya di Daerah.

Hal pokok dari Divisi Bambu Runcing, yang dibentuk oleh Sutan Akbar, adalah bukan merupakan bagian dari kesatuan reguler atau ketentaraan Republik Indonesia, meski Sutan Akbar menamai satuannya dengan istilah "divisi" pada nama kesatuan yang dibentuknya. Nampaknya, istilah "divisi" yang digunakan oleh Sutan Akbar hanya sebagai topeng agar diterima oleh rakyat, seperti yang diungkapkan oleh R. Fachrudin (1994), sebagai berikut:

Setidaknya, istilah itu menjadi simbol klaim, bahkan legitimasi, bagi para anggotanya bahwa keberadaan mereka merupakan langkah "resmi" bagi suatu perjuangan nasional Indonesia (Fachrudin, 1994:42).

Secara teknis, istilah "divisi" tidaklah kaku. Mungkin saja Divisi Bambu Runcing memiliki pasukan beberapa ribu orang, namun tidak semuanya bersenjata dan berkelompok di sekitar inti pasukan yang pernah bernaung di dalam LRDR (Lasjkar Rakjat Djakarta Raya), yang secara relatif lebih terlatih dengan baik apabila dibandingkan dengan pasukan yang ada di Divisi Bambu Runcing bentukan Sutan

Akbar. Namun, setidaknya keberadaan Divisi Bambu Runcing merupakan perwujudan sikap perjuangan tanpa kompromi yang menuntut tidak diberikannya konsesi apapun kepada Belanda. Melalui prinsip ini, mereka hanya menginginkan kemerdekaan 100% bagi Republik Indonesia (Anderson, 1980; dan Suwirta, 2015).

### GERAKAN SUTAN AKBAR DI CIWARU

Belanda telah selesai dengan aksi militernya yang pertama pada tahun 1947; dan berhasil menduduki kota-kota penting serta dapat menghancurkan kekuatan dari tentara resmi negara Republik Indonesia, yakni Divisi Siliwangi di Jawa Barat (Sewaka, 1955; dan Ekadjati, 1980/1981). Namun anggapan dari pihak Belanda dan pemerintah Indonesia pun keliru mengenai eksistensi dari pasukan Divisi Siliwangi. Nyatanya, kekuatan Divisi Siliwangi di Jawa Barat tidaklah benar-benar hancur; gerakan mundur ke hutan-hutan dalam rangka menguatkan koordinasi dan membentuk ulang kekuatan, ternyata berjalan dengan baik (cf Nasution, 1979; Ekadjati, 1980/1981; dan Wiryono, 1997/1998). Masih terdapat kesatuan-kesatuan Siliwangi yang berpusat di pegunungan sebelah selatan Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Di sana Belanda sulit untuk menembus pertahanan Divisi Siliwangi (Nasution, 1979).

Dari pusat pangkalan Siliwangi yang masih tersisa, A.H. Nasution, sebagai Komandan Divisi Siliwangi, berusaha untuk melakukan pemulihan kembali untuk koordinasi dan kerjasama antar kesatuan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Pada bulan Oktober 1947, misalnya, A.H. Nasution mengumumkan terbentuknya lima *wehrkreise*, semacam daerah militer, di Jawa Barat (Nasution, 1979). Pembentukan *wehrkreise* ini dimaksudkan untuk memulihkan wawasan mengenai komando militer tunggal di setiap daerah. Dengan adanya sistem ini diharapkan terbentuk

pimpinan gabungan militer-sipil tunggal bagi perjuangan di Jawa Barat. Sehingga, fasilitas dan otoritas pemerintahan sipil akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh tentara dalam perjuangan militernya (Nasution, 1966 dan 1979).

Pada bulan Desember 1947, A.H. Nasution memperluas struktur *wehrkreise* itu ke tingkatan bawah dengan membentuk *sub wehrkreise*, seperti: KDM (Komando Distrik Militer) dan KODM (Komando Onder Distrik Militer), yang terdiri atas satuan-satuan resimen, batalyon, dan kompi (Nasution, 1966 dan 1979). Struktur yang dibuat itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan hierarki pemerintahan sipil yang telah terbentuk dan mapan, seperti: Kabupaten, Kawedanan, dan Kecamatan.

Berkaitan dengan rencana yang akan dijalankan oleh Divisi Siliwangi dalam pembentukan *wehrkreise* ini, terjadi hal yang tidak diinginkan antara pihak Divisi Siliwangi dan Divisi Bambu Runcing. Ketegangan terjadi antara Divisi Siliwangi dengan satuan Divisi Bambu Runcing, pimpinan Sutan Akbar, yang bermarkas di Ciwaru. Sistem *wehrkreise* yang akan diterapkan tentu saja secara otomatis menempatkan semua pasukan bersenjata Indonesia di daerah pendudukan Jawa Barat di bawah komando Divisi Siliwangi (Nasution, 1966 dan 1979).

Oleh karena itu, A.H. Nasution secara resmi mencabut mandat yang pernah diberikan oleh Jenderal Sudirman kepada Sutan Akbar selaku pimpinan perjuangan di Jawa Barat pada tanggal 25 September 1947, dengan bantuan kawan-kawannya yang ada di Staf Umum Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta (cf Disjarahdam VI Siliwangi, 1978; Nasution, 1979; Hermawan, 2000; DHC '45 Kab Kuningan, 2006; dan Sudarta, 2013). Namun, pencabutan mandat oleh A.H. Nasution tidak dianggap dan tidak diindahkan sama sekali oleh Sutan Akbar. Meskipun Sutan Akbar sudah tidak

memiliki mandat lagi sebagai seorang pimpinan, Sutan Akbar tetap terus mengorganisasikan pasukan gerilyanya di sekitar wilayah Ciwaru.

Sikap dan tindakan dari Sutan Akbar tentu saja membuat ketegangan antara pasukan Divisi Bambu Runcing dengan Divisi Siliwangi. Kegiatan yang saling mengintimidasi dan provokasi antar kedua kekuatan bersenjata ini terus terjadi. Bahkan ketegangan yang terjadi di Ciwaru, yang diakibatkan oleh pasukan Sutan Akbar mengganggu rencana-rencana yang telah dirancang oleh pihak tentara Divisi Siliwangi semakin menjadi-jadi. Hal ini diungkapkan oleh A.H. Nasution (1979), sebagai berikut:

Setelah terjadi pembagian tugas dan koordinasi yang diatur oleh pihak tentara dengan diresmikannya Komando Daerah Militer Cirebon di bawah Abimanyu, maka diharapkan terlebarnya kembali kelasykaran yang beraneka warna, yang dapat mengakibatkan perpecahan kembali terjadi. Tapi kenyataannya berlainan. Dengan kedatangan Sutan Akbar, maka terjadilah perubahan yang besar, yang hampir-hampir tenaga tentara kita yang sedang disusun kembali secara teratur sekaligus akan pecah.

Akbar mendapat mandat dari Panglima Sudirman untuk menyusun kekuatan-kekuatan lagi di Jawa Barat dengan dasar pikiran bahwa pimpinan dan tentara yang ada di Jawa Barat sudah kacau-balau; dan untuk membentuk Divisi Bambu Runcing, kelasykaran-kelasykaran dapat ditarik kembali ke bawah pimpinannya. Pengaruh Divisi Bambu Runcing begitu terasa dan mengganggu rencana-rencana yang telah dilakukan oleh tentara (Nasution, 1979:134).

Aktivitas dan pengaruh dari Divisi Bambu Runcing di wilayah Ciwaru telah menyebabkan sebuah ketimpangan dan kekacauan di tengah-tengah upaya pembentukan *wehrkreise* di bawah pimpinan Letnan Kolonel Abimanyu. Selain itu, Sutan Akbar selalu menekankan bahwa Divisi Bambu Runcing adalah organisasi perjuangan yang resmi untuk wilayah Jawa Barat. Sementara itu, pada

waktu yang bersamaan, Sutan Akbar selalu mempropagandakan bahwa Divisi Siliwangi sebagai antek-antek Belanda dan telah berkapitulasi kepada Belanda. Bahkan Sutan Akbar mempropagandakan bahwa SLW, yang merupakan kependekan dari "Siliwangi", diplesetkan sebagai *Stoot Leger Wilhelmina* atau Tentara Kerajaan Wilhelmina sebagai Ratu Belanda (cf Nasution, 1979; dan DHC '45 Kab Kuningan, 2006).

Tidak hanya itu tindakan yang dilakukan oleh Sutan Akbar, pasukan Divisi Bambu Runcing pun mempengaruhi unsur-unsur di dalam tubuh Divisi Siliwangi agar berpihak kepadanya. Beberapa orang berhasil masuk dalam pengaruh Sutan Akbar. Pada akhirnya, Sutan Akbar pun dapat memastikan untuk menetapkan komandan-komandan pasukan dari KMD (Komando Distrik Militer), sebuah struktur pemerintah militer tingkat Keresidenan Cirebon, seperti Machmud dan Runawi, sebagai komandan pasukannya pada awal November 1947 (Nasution, 1979:349).

Aktivitas yang dikategorikan sangat berbahaya oleh Divisi Siliwangi atas tindakan yang dilakukan oleh Divisi Bambu Runcing adalah perihal penyitaan perbekalan Divisi Siliwangi dan penangkapan seorang Komandan KOMPI pasukan Letnan Kolonel Abimanyu, yakni Kapten Rukman. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1947, berangkatlah dari Yogyakarta Letda (Letnan Dua) Kadar Darsono. Dia adalah anggota Staf Umum yang diutus ke Jawa Tengah untuk mengambil uang, peluru, dan alat-alat radio untuk kemudian diserahkan kepada Divisi Siliwangi di Jawa Barat.

Namun, kedatangan kembali pasukan pimpinan Letda Kadar Darsono pada bulan Januari 1948 tidak berjalan dengan lancar. Letda Kadar Darsono dan beberapa pasukannya dicegat oleh pasukan-pasukan Divisi Bambu Runcing di Ciwaru, Kuningan, Jawa

Barat. Suplai untuk Divisi Siliwangi dari pemerintah Republik Indonesia, berupa uang Rp. 6,000,000 (enam juta Rupiah), sejumlah peti peluru, dan tiga buah pesawat radio yang dibawa pun akhirnya disita. Bahkan terdapat beberapa anggota tentara terbunuh akibat pertempuran yang terjadi dalam peristiwa penyitaan barang tersebut (Fachrudin, 1994:48).

Melalui modal tersebut, dalam waktu yang sangat singkat, Sutan Akbar berhasil mempengaruhi serta menarik lasykar-lasykar yang ada di Kuningan, khususnya Ciwaru, untuk bergabung dalam pasukannya. Ketegangan antara TNI (Tentara Nasional Indonesia), dalam hal ini Divisi Siliwangi, dengan Divisi Bambu Runcing terus berlangsung. Sering terjadi penculikan, pembunuhan, perampasan senjata, bahkan perampokan beberapa juta uang dan *zender* (pesawat penyiar radio) yang berasal dari Yogyakarta untuk keperluan KMD Cirebon (Disjarahdam VI Siliwangi, 1978; dan Nasution, 1979).

Ketika propaganda yang dilakukan oleh Divisi Bambu Runcing terus-menerus digencarkan, Kapten Adi, yang merupakan utusan pasukan Letnan Kolonel Abimanyu, ditugasi untuk menemui Residen Hamdani selaku pemimpin Keresidenan Cirebon. Pertemuan ditujukan untuk menyelesaikan masalah perselisihan dengan pasukan Divisi Bambu Runcing. Namun, usaha ini gagal karena ketika mereka ingin menemui Residen Hamdani, dalam perjalanan mereka dihadang oleh pasukan Divisi Bambu Runcing yang menyergap pasukan mereka di Kampung Citikus, Legokherang, yang sekarang masuk ke wilayah Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.

Tindakan Divisi Bambu Runcing tidak hanya sampai disana, Komandan Batalyon Sunan Gunung Djati, Mayor Rukman, juga disergap dan kemudian disekap dalam tahanan. Pada saat itu Mayor Rukman sedang dalam perjalanan menuju pos Sutan Akbar

atas perintah Letnan Kolonel Abimanyu. Dalam perjalanannya, Mayor Rukman menginap di Desa Walahar dengan dua orang bawahannya. Pada waktu Mayor Rukman keluar rumah, tiba-tiba ia disergap oleh dua orang anggota Divisi Bambu Runcing dan kemudian dijebloskan kedalam tahanan. Pada malam berikutnya, sekitar pukul 01.00 dinihari, Mayor Rukman berhasil meloloskan diri dengan jalan mendobrak dinding yang terbuat dari bilik Bambu. Dalam keadaan gelap-gulita, Mayor Rukman dan bawahannya melarikan diri dengan menelusuri sungai. Pada pukul 05.00 pagi, mereka berhasil kembali ke posnya semula. Kejadian penahanan Mayor Rukman ini berdekatan waktunya dengan penyitaan suplai besar untuk Divisi Siliwangi dari Staf Umum Yogyakarta (*cf* Fachrudin, 1994:49; dan Emran, 2004:258).

Tindakan Divisi Bambu Runcing yang menangkap Mayor Rukman telah mendorong Letnan Kolonel Abimanyu, selaku Komandan Brigade V Sunan Gunung Djati, untuk mengambil sikap tegas terhadap keberadaan Sutan Akbar beserta pasukannya. Letnan Kolonel Abimanyu mengambil keputusan bahwa Divisi Bambu Runcing harus dihancurkan. Letnan Kolonel Abimanyu kemudian menyiapkan pasukan-pasukan dengan menarik pasukan yang sedang bertugas di wilayah utara Ciwaru atau selatan kota Cirebon dan Kuningan untuk bergabung dalam operasi penumpasan Sutan Akbar dan pasukan Divisi Bambu Runcing (Disjarahdam VI Siliwangi, 1978; dan Nasution, 1979).

#### **PENUMPASAN DIVISI BAMBU RUNCING DI CIWARU**

Pada tanggal 14 Januari 1948, pukul 23.00, terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan dan merupakan lembaran hitam dalam sejarah perjuangan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia (Emran, 2004:250). Pasukan Divisi Siliwangi terus bergerak menyerang posisi-posisi

pasukan Divisi Bambu Runcing di Ciwaru. Satuan-satuan Mayor Rukman dan Mayor Umar Wirahadikusumah dapat mengepung posisi-posisi pasukan Divisi Bambu Runcing. Sutan Akbar tidak mengira bahwa sebagian pasukan Divisi Siliwangi, yang telah berhasil dipengaruhinya untuk bergabung dalam Divisi Bambu Runcing, malah berbalik untuk melawannya. Divisi Bambu Runcing, dengan jumlah kekuatan dua kompi, melawan pasukan Divisi Siliwangi. Maka terjadilah penyerangan dan pertempuran yang berlangsung beberapa hari. Dalam empat hari operasi, pasukan Divisi Siliwangi dapat menduduki Ciwaru (*cf* Disjarahdam VI Siliwangi, 1978; Nasution, 1979; dan Emran, 2004).

Dalam operasinya, pasukan Divisi Siliwangi berhasil menangkap para pemimpin pasukan Divisi Bambu Runcing yang berpengaruh di Ciwaru, termasuk Sastroswiryo dan Maulana, yang pada akhirnya ditembak mati di tempat. Perkiraan mengenai jumlah tokoh Divisi Bambu Runcing di Ciwaru yang berhasil ditembak mati dan tebusan berkisar antara 17 sampai 64 orang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pimpinan pasukan Divisi Bambu Runcing telah berhasil ditumpas. Peperangan yang terjadi di Ciwaru bisa dikatakan “perang antara pribumi dengan pribumi”, karena terjadi antara pasukan Divisi Siliwangi dengan pasukan Divisi Bambu Runcing. Sedangkan pasukan Divisi Siliwangi tidaklah sampai terlibat peperangan yang sengit dengan pasukan Belanda di Ciwaru, apabila dibandingkan dengan perang melawan pasukan Divisi Bambu Runcing pimpinan Sutan Akbar (DHC '45 Kab Kuningan, 2006; dan Sudarta, 2013).

Namun, selama peperangan terjadi, Sutan Akbar dapat meloloskan diri dari serangan yang dilancarkan oleh pasukan Divisi Siliwangi, yang dikerahkan oleh Letnan Kolonel Abimanyu, dengan menyusuri Sungai Cisanggarung. Namun ia tidak pernah

muncul lagi ketika satuan tentara yang mengejanya mengepung sungai itu dan menembaknya. Dalam peristiwa tersebut berhasil ditawan sekitar 100 orang dari pasukan Divisi Bambu Runcing dan kemudian 24 orang diantaranya dilepaskan. Uang yang pernah disita oleh pasukan Divisi Bambu Runcing pun kembali diperoleh sekitar Rp. 3,900,000, baca: tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah (*cf* Fachrudin, 1994:50; dan Emran, 2004).

Bentrokan-bentrokan dan peristiwa keras yang terjadi di Ciwaru antara pasukan Divisi Bambu Runcing dengan pasukan Divisi Siliwangi bukan semata karena insiden-insiden seperti yang telah disebutkan di atas. Yang menjadi faktor utama, dan juga terpenting, seperti diungkapkan oleh A.H Nasution (1979) adalah bahwa,

Divisi Bambu Runcing itu menempati daerah Ciwaru yang amat penting artinya, baik strategis maupun politis. Strategis penting, karena di sinilah pintu gerbang dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, jadi stasiun perhubungan divisi ini dengan Yogyakarta. Ini disebabkan keadaan bumi dan karena posisi-posisi musuh memaksa kita berpintu gerbang di sini. Politis sangat penting, karena Residen Hamdani bersama staf pemerintahan sipil juga berada di sini.

Sedangkan kegiatan Divisi Bambu Runcing, yang dipimpin oleh para politisi aliran Tan Malaka, ialah hendak mempengaruhi pimpinan pemerintahan sipil tersebut dan menguasai lalu-lintas Divisi Siliwangi ke Yogyakarta (Nasution, 1979:346).

Meski posisi masing-masing pihak, baik pasukan Divisi Siliwangi maupun pasukan Divisi Bambu Runcing, relatif aman dari serangan Belanda, namun pertikaian keras diantara keduanya tidak dapat dihindarkan. Salah satu pihak harus merebut daerah Ciwaru untuk dapat meneruskan perjuangan di wilayah Jawa Barat. Dalam konflik yang terjadi di Ciwaru antara pasukan Divisi Siliwangi dengan pasukan Divisi Bambu Runcing, pasukan Divisi Siliwangi mampu mengungguli dan membuat

kesatuan Divisi Bambu Runcing di Ciwaru hanya berusia sekitar 6 bulan saja, yakni dari bulan Agustus 1947 hingga bulan Januari 1948 (Nasution, 1979; dan Emran, 2004).

## KESIMPULAN <sup>1</sup>

Divisi Bambu Runcing merupakan sebuah kesatuan lasykar yang berbasis di wilayah Jawa Barat selama revolusi kemerdekaan Indonesia berlangsung, atau lebih tepatnya setelah Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama pada bulan Juli 1947. Kesatuan Divisi Bambu Runcing ini memilih berpusat di Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang pada saat revolusi kemerdekaan dipilih menjadi Pusat Pemerintahan Darurat Keresidenan Cirebon, karena Kota Cirebon telah dikuasai oleh Belanda dalam Agresi Militer I.

Secara resmi, panglima dari kesatuan Divisi Bambu Runcing adalah Letnan Kolonel Sutan Akbar, yang menetapkan pangkalannya di Ciwaru. Keberadaan pasukan Divisi Bambu Runcing sendiri merupakan inisiatif dari Sutan Akbar dalam memanfaatkan situasi kacau di Jawa Barat akibat serangan oleh pihak Belanda. Setelah pasukan Divisi Siliwangi terpukul mundur oleh pasukan Belanda, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Jenderal Sudirman memberikan mandat secara rahasia kepada Sutan Akbar untuk merebut kembali Jawa Barat dari tangan Belanda. Dapat dikatakan bahwa pasukan Divisi Bambu Runcing terbentuk ketika terjadi *vaccum* kekuatan militer Republik Indonesia,

---

<sup>1</sup>Artikel ini merupakan ringkasan Skripsi Sarjana dari Penulis I (Rinaldo Adi Pratama) di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, dengan dibimbing oleh Penulis II (Moch Eryk Kamsori) dan Andi Suwirta. Kami (Penulis I dan II) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada Andi Suwirta, yang telah membantu penyelesaian penulisan artikel ini. Walau bagaimanapun, semua isi dan interpretasi dalam artikel ini menjadi tanggung jawab akademik kami sepenuhnya (Penulis I dan II).

setelah Belanda berhasil merebut kota-kota penting di Jawa Barat melalui aksi militernya.

Dalam perjalanannya, Divisi Bambu Runcing terus bertentangan dengan segala kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Penentangan tersebut berujung dengan berhadapannya kekuatan Divisi Bambu Runcing dengan pasukan Divisi Siliwangi, sehingga Divisi Bambu Runcing harus mengalami kehancuran. Gejala kehancuran pasukan Divisi Bambu Runcing sebenarnya sudah mulai terlihat ketika Belanda melancarkan agresinya yang kedua pada bulan Desember 1948. Pada saat itu terjadi silang pendapat antara pimpinan Divisi Bambu Runcing untuk terus menentang pemerintah Republik Indonesia atau mendukung pemerintah, karena melihat hasil perundingan sudah menunjukkan keberpihakan untuk kemenangan Republik Indonesia atas Belanda.

Namun, yang terlihat jelas mengenai kehancuran dini dari pasukan Divisi Bambu Runcing adalah penyerangan habis-habisan yang dilakukan oleh pasukan Divisi Siliwangi terhadap keberadaan Divisi Bambu Runcing, yang terdapat di Ciwaru; dan menyebabkan banyak tokoh penting dari pimpinan pasukan Divisi Bambu Runcing tertangkap dan terbunuh.<sup>2</sup>

## Referensi

- Anderson, Ben. (1980). *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1942-1946*. Jakarta: Sinar Harapan, Terjemahan.
- Cribb, R. (1991). *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesia Revolution, 1945-1949*. Australia: Allen and Unwin.

---

<sup>2</sup>**Pernyataan:** Dengan ini kami menyatakan secara sungguh-sungguh bahwa artikel ini adalah karya kami berdua. Ianya bukan hasil plagiat, karena sumber-sumber yang kami rujuk sangat jelas dicantumkan dalam daftar rujukan atau Referensi. Artikel ini juga belum pernah dikirim, direviu, dan diterbitkan oleh jurnal lainnya.

- DHC '45 Kab [Dewan Harian Cabang 1945 Kabupaten] Kuningan. (2006). *Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Disjarahdam [Dinas Sejarah Daerah Militer] VI Siliwangi. (1978). *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Bandung: Angkasa.
- Ekadjati, E.S. (1980/1981). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Emran, A. (2004). "Kabupaten Kuningan: Dari Masa Revolusi hingga Pembangunan di Indonesia" dalam Asmawi Zainul & Didin Saripudin [eds]. *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, 1954-2004: Mozaik Pemikiran tentang Sejarah, Pendidikan Sejarah, dan Budaya*. Bandung: Historia Utama Press, hlm.243-298.
- Fachrudin, R. (1994). "Divisi Bambu Runcing (DBR): Sosok dan Aktivasnya di Celah-celah Pendudukan Jawa Barat, Juli 1947 – Oktober 1949". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Depok: Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra UI [Universitas Indonesia].
- Hermawan, W. (2000). *Kuningan Menembus Waktu*. Kuningan: Humas Pemda [Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah] Kabupaten Kuningan.
- Lubis, N.H. (2003). *Sejarah Tatar Sunda, Jilid 2*. Bandung: Lembaga Penelitian UNPAD [Universitas Padjadjaran].
- Nasution, A.H. (1966). *Sedjarah Nasional di Bidang Bersendjata*. Djakarta: Mega Bookstore.
- Nasution, A.H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jilid 5 dan 6*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Sewaka. (1955). *Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman*. Bandung: t.p. [tanpa penerbit].
- Sudarta, T. (2013). *Perjuangan Rakyat Kuningan dari Masa ke Masa*. Bandung: Mentari Offset.
- Suwirta, Andi. (2015). *Revolusi Indonesia dalam News & Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tjokropranolo. (1992). *Panglima Besar TNI Jendral Sudirman, Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia: Kisah Seorang Pengawal*. Jakarta: Surya Persindo.
- Wiryono, H. (1997/1998). *Peranan Masyarakat Kuningan dalam Mempertahankan Kedaulatan RI Tahun 1945-1950*. Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.



**Salah Seorang Anggota Pasukan Divisi Bambu Runcing**  
(Sumber: <http://Online2012.blogspot.co.id>, 2/3/2015)

Pada tanggal 14 Januari 1948, pukul 23.00, terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan dan merupakan lembaran hitam dalam sejarah perjuangan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Pasukan Divisi Siliwangi terus bergerak menyerang posisi-posisi Divisi Bambu Runcing di Ciwaru. Satuan-satuan Mayor Rukman dan Mayor Umar Wirahadikusumah dapat mengepung posisi-posisi pasukan Divisi Bambu Runcing. Sutan Akbar tidak mengira bahwa sebagian pasukan Divisi Siliwangi, yang telah berhasil dipengaruhi untuk bergabung dalam Divisi Bambu Runcing, malah berbalik untuk melawannya.